



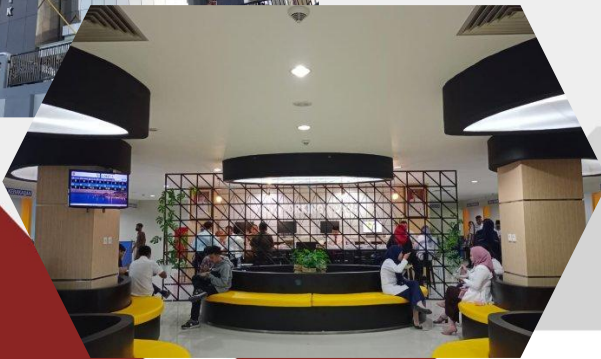
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MAL PELAYANAN
PUBLIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



Jl. Pahlawan No. 01

Gedung Mal Pelayanan Publik Samarinda

www.dpmpptsp.samarindakota.go.id



BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



KATA PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/0641/100.20

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih terorientasi pada hasil, relevan, efektif dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Samarinda, 25 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Julia Noor, S.I.P

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19650717 198609 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. LKjIP tahun 2024 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2024 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran yakni meningkatnya Pertumbuhan Investasi. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Secara umum DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Khusus pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman



Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman Modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DPMTSP kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DPMTSP dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis DPMTSP tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DPMTSP yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Tahun 2024 berdasarkan RENSTRA DPMTSP Kota Samarinda telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai. Berikut disajikan tabel capaian kinerja dari DPMTSP Kota Samarinda yang berhasil dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut :



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.000.000.000.000,-	Rp. 3.189.856.172.525,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 3.049.090.107.114,- PMA : Rp. 140.766.065.401,-	106,33 %	√		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5	92,75	101,36%	√		
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %	98,37 %	98,37%	√		

Dari tabel hasil pengukuran kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “SANGAT BAIK”. dengan capaian rata-rata dari seluruh target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebesar 102,07%. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur DPMTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data. Guna menghadapi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMTSP, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan Renstra disepakati oleh Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Perangkat Daerah diperkenankan mengubah atau mengganti program yang kurang memiliki tujuan atau goals ke program yang lebih tepat.



3. Sasaran adalah outcome atau benefit dari program atau kegiatan sub kegiatan.
4. Melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda dan terus melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMTSP Kota Samarinda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.
5. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.
6. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
7. Membangun Kemitraan UMKM dengan Investor dengan melaksanakan Kegiatan temu usaha untuk meningkatkan Kemitraan Usaha UMKM dengan pelaku pasar serta melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Usaha UMKM.
8. Perbaikan proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Ombudsman dan BKPM.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya *Online Single Submission (OSS) Public Speaking, Exelent Service* kepada pegawai dilingkungan DPMTSP Kota Samarinda.
10. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan *up grade* system aplikasi.
11. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP.



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun 2024 telah memenuhi harapan dan mencapai target. Sehingga pada tahun berikutnya capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda akan terus ditingkatkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	5
3. Ruang Lingkup	5
1.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
1. Tugas Pokok	6
2. Fungsi	7
3. Tata Organisasi	8
4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMTSP	10
1.3. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023... ..	13
1.4. Sistematika Penyajian	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
2.3. Perencanaan Keuangan	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26



2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2. Meningkatkan Realisasi Investasi	36
1. Program Pengembangan Iklim Investasi	37
2. Program Promosi Penanaman Modal	40
3. Program Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal	42
3.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	46
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	50
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	57
3.4. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	59
1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	59
3.5. Akuntabilitas Keuangan	60
3.6. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024	65
3.7. Prestasi.....	68
BAB IV PENUTUP	69

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. IKU Tahun 2024
3. Matriks RKT Tahun 2024
4. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Belanja
Langsung APBDP Tahun 2024



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP	10



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Personil berdasarkan Eselon/Non Eselon	11
Tabel 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	12
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DPMTSP Tahun 2024	21
Tabel 2.3. Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	21
Tabel 2.4. Belanja pada DPMTSP Tahun 2024	22
Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	22
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.2. Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMTSP DPMTSP Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022-2024	29
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Nilai Realisasi Investasi Kota dan Provinsi Kaltim	31
Tabel 3.4. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kerja Indikator Kinerja Jumlah Regulasi yang Mendukung Investasi	37
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi	40
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024	43
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Prima	46
Tabel 3.10. Nilai Rata-Rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan	47
Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Penerbitan Izin	50
Tabel 3.12. Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi MPP Digital Tahun 2024	55



Tabel 3.13. Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)	56
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Pengembangan Aplikasi IT DPMTSP Kota Samarinda	57
Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59
Tabel 3.16. Program dan Kegiatan (Pagu APBD) Tahun 2024	61
Tabel 3.17. Analisis Efisiensi Anggaran (Pagu APBD) Tahun 2024	65



DAFTAR GRAFIK

Halaman

1.1. Jumlah personil DMPTSP	10
1.2. Jumlah personil berdasarkan Golongan.....	11
1.3. Jumlah personil berdasarkan Tingkat Pendidikan	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang bermuara pada perubahan *mind set* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan kegiatan pengukuran kinerja yang secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik



lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMTSP Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal yang dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMTSP dalam menyelenggarakan



pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang juga diperbaharui melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021. Dengan Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren di bidang Penanaman Modal. Untuk mencapai fungsi tersebut, maka Indikator Kinerja DPMTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN;
2. Jumlah nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Jumlah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMTSP Kota Samarinda pada tahun anggaran 2024 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 21.774.452.134,-** (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga



puluh empat rupiah). Yang terbagi untuk belanja pegawai sebesar **Rp. 10.893.917.663,-** (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah); Belanja Barang dan Jasa **Rp. 9.888.794.471,-** (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan untuk belanja modal sebesar **Rp. 991.740.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari segi Penerimaan target retribusi yang ditetapkan sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (empat milyar rupiah) pada APBD Tahun 2024. Total penerimaan retribusi yang tercapai pada tahun 2024 sebesar **Rp. 5.333.797.623,-** (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari penerimaan retribusi IMB/PBG sebesar **Rp. 5.271.797.623,-** (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan penerimaan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL) sebesar **Rp. 62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat Kota Samarinda, DPMTSP terus berbenah dan mengoptimalkan inovasi pelayanan seperti Aplikasi SIPELATARAN (Sistem Pelayanan Langsung Tanpa Antrian), Whatsapp (pendaftaran konsultasi dikomunikasikan melalui WA) dimana berkas persyaratan dikirimkan ke DPMTSP atau melalui website dpmptsp.samarindakota.go.id/portal.html yang akan segera ditangani oleh petugas layanan. Disamping itu, dalam rangka upaya *paperless* DPMTSP juga melaksanakan SKM Online yang difasilitasi oleh petugas pelayanan.



2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol dari kegiatan-kegiatan DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024 dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja investasi penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini mengenai kegiatan investasi penanaman modal dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan DPMTSP Kota Samarinda dengan urutan pembahasan adalah :

- a. Pendahuluan
- b. Perencanaan Kinerja
- c. Akuntabilitas Kinerja
- d. Penutup

1.2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda berasal dari penggabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang juga diperbaharui melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021.

1. TUGAS POKOK

Tugas Pokok DPMTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 pada Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021.

Tujuan dibentuknya DPMTSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan bidang investasi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. dengan sasaran Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMTSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123, Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964 Email : dpmptsp.smd@gmail.com, Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/mpp.samarindakota.go.id.

TUGAS POKOK DPMTSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, maka DPMTSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :



1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tata Organisasi

- **Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, yaitu :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

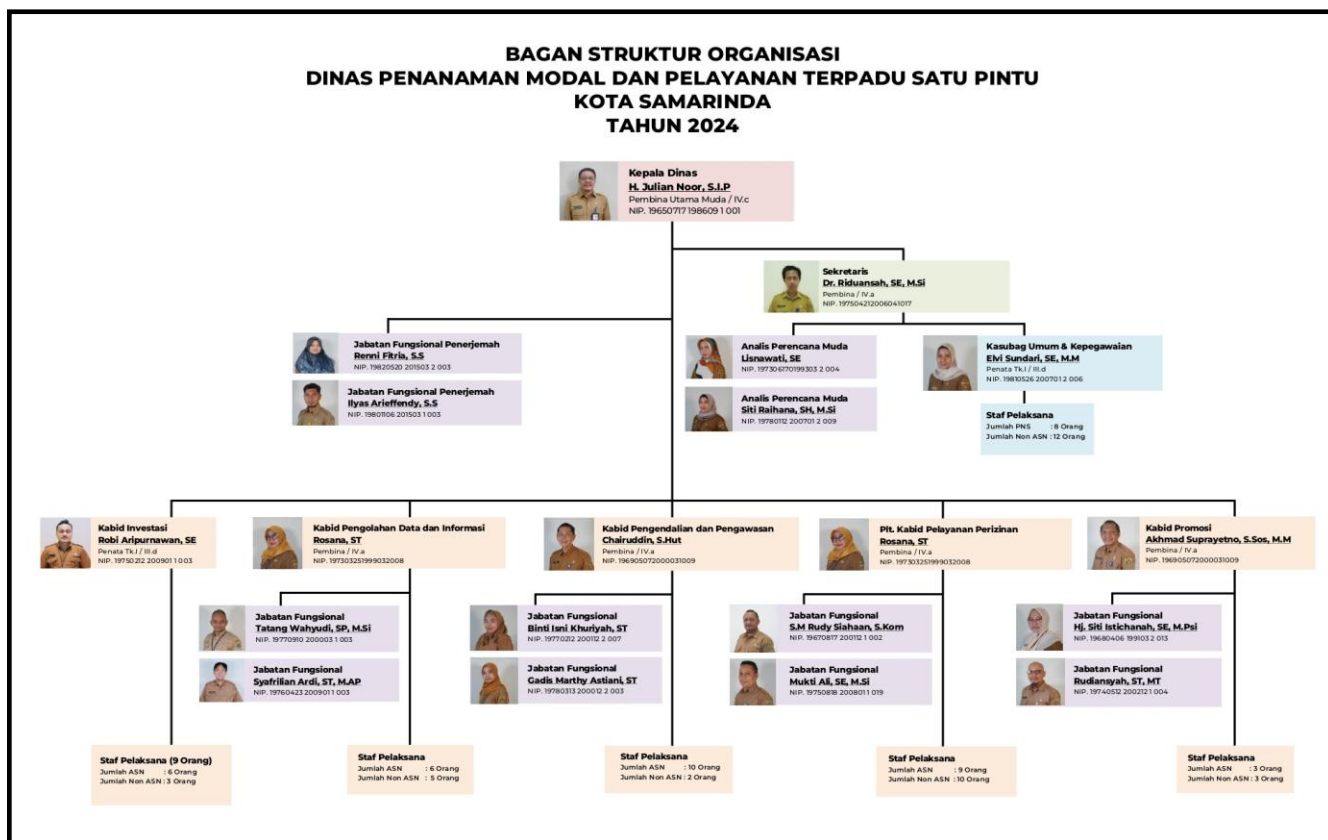


- Staf
- 3. Bidang Investasi, membawahi :
 - Staf
- 4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahi :
 - Staf
- 5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - Staf
- 6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - Staf
- 7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - Staf
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi saat ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana dalam aturan sebelumnya pada bidang-bidang terdapat sub seksi yang memiliki kepala seksi dan dianggap kurang efektif dan efisien sehingga dilakukan perampingan pada tingkat birokrasi. Adapun maksud dari perampingan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Langkah ini juga dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, mempercepat pengambilan keputusan, serta dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, perampingan juga berkaitan dengan Penyederhanaan birokrasi yang saat ini menjadi titik fokus pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparatur pemerintah.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1

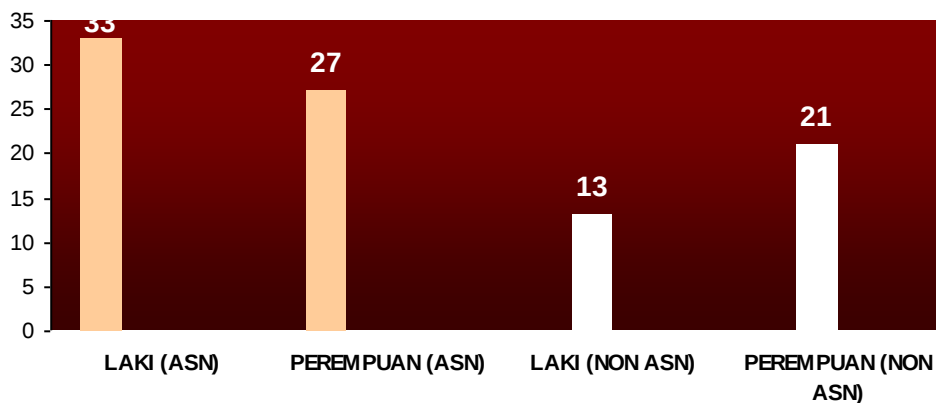


4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMTSP

a. Sumber Daya Manusia DPMTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 94 orang dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1.1
Jumlah Personil DMPTSP

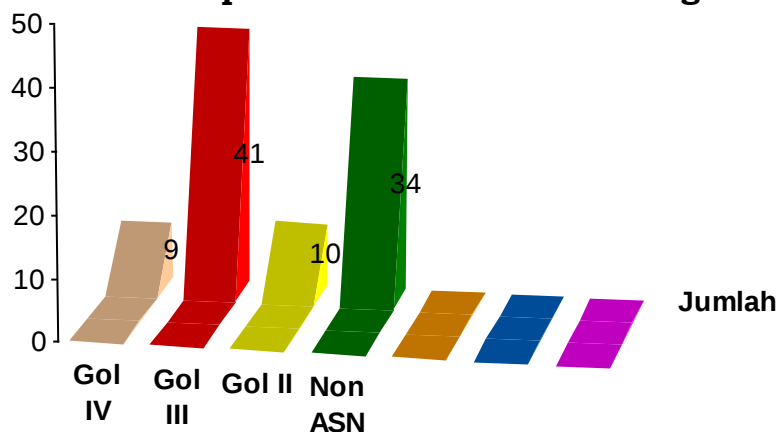




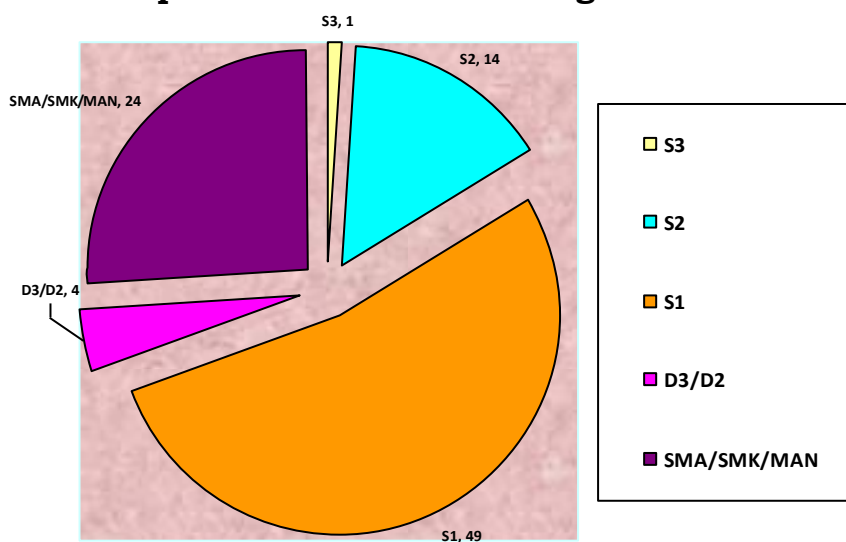
Tabel 1.1
Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III b	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Eselon IV a	Kasubbag Umum	1 Orang
5.	Fungsional	Jabatan Fungsional	12 Orang
6.	Non Eselon	Staf	41 Orang
7.	Non ASN	Staf	34 Orang
Jumlah Keseluruhan			94 Orang

Grafik 1.2
Jumlah personil Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan





b. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bagunan Gedung Kantor	Unit	2
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27
11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3
30	Server ZOAN ST 160-R521	Unit	1

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk seluruh pelayanan yang ada di DPMTSP Kota Samarinda.



1.3. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

1. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari evaluasi Inspektorat Kota Samarinda, maka ada beberapa hal yang telah direkomendasikan oleh Inspektorat Kota Samarinda kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) untuk segera diperbaiki, antara lain sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan kinerja belum diberikan nomor dokumen.
2. Dokumen Renstra dan Renja belum selaras dibagian sasaran dan tujuan.
3. Membuat formulasi perhitungan target dan sumber data.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum membuat formulasi pengukuran.
5. Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja.
6. Membuat formulasi capaian kinerja dan melengkapi bukti dukung hasil survey nilai investasi per triwulan.
7. Membuat laporan triwulan I dan triwulan II bidang Pelayanan Perizinan.
8. Membuat capaian kinerja berdasarkan program kegiatan.
9. Membuat dokumen laporan kinerja belum menggambarkan substansi.
10. Laporan kinerja belum menggambarkan perbandingan dua tahun sebelumnya 2021 dan 2022.
11. Laporan kinerja utama sudah berorientasi hasil namun masih terdapat target kinerja utama yang belum tercapai seperti nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
12. Evaluator mandiri di DPMTSP yang memiliki sertifikat perencanaan hanya 4 orang.
13. Belum membuat kertas kerja evaluasi tindak lanjut bidang pelayanan penanganan pengaduan dan membuat laporan evaluasi triwulan III dan IV.
14. Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
15. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang belum tercapai 100%.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **78,75 dengan kategori BB (Sangat**



Baik). Berikut disajikan tabel evaluasi mandiri dan evaluasi AKIP dari Inspektorat sebagai berikut :

Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP pada aplikasi SIMUARA

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	30
Pengukuran Kinerja	30%	30
Pelaporan Kinerja	15%	15
Evaluasi AKIP	25%	25
Jumlah	100%	100

**Hasil Nilai Evaluasi Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/739/200
Tanggal 29 Mei 2024**

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	27
Pengukuran Kinerja	30%	22
Pelaporan Kinerja	15%	12,75
Evaluasi AKIP	25%	17
Jumlah	100%	78,75

Adapun hal yang menjadi kendala dalam evaluasi AKIP tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penguplodan dokumen pada Aplikasi “SIMUARA” belum mewakili seluruh dokumen yang di evaluasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen yang tidak bisa di upload dikarenakan minimnya kapasitas data yang diberikan dalam sistem aplikasi.
2. Tim QnA yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Ortal, Bagian Hukum dan Bapperida belum mensosialisasikan Juknis terkait mekanisme QnA pada evaluasi AKIP.
3. Tidak ada jadwal masa sanggah bagi OPD untuk dapat melakukan klarifikasi terkait pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.



2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2023

No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi	Bukti Dukung
1.	Dokumen perencanaan kinerja belum diberikan nomor dokumen	Dokumen perencanaan kinerja telah diberikan nomor dokumen	Renstra, Renja, IKU, PK dan Rencana Aksi telah diberi nomor
2.	Dokumen Renstra dan Renja belum selaras dibagian sasaran dan tujuan	Dokumen Renstra dan Renja telah selaras	Dapat dilihat pada Dokumen Renja halaman 34 dan Dokumen Renstra halaman 26-27
3.	Membuat formulasi perhitungan target dan sumber data	formulasi perhitungan target dan sumber data telah di input dalam dokumen laporan kinerja	Dapat dilihat pada Dokumen IKU
4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum membuat formulasi pengukuran	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terdapat formulasi pengukuran	Dokumen IKU
5.	Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja	SOP Pengumpulan Data Kinerja telah dibuat	SOP Pengumpulan Data Kinerja
6.	Membuat formulasi capaian kinerja dan melengkapi bukti dukung hasil survey nilai investasi per triwulan	Bidang Investasi telah membuat dokumen yang berisi capaian kinerja namun untuk hasil survei terdapat dalam dokumen SKM DPMTSP	Laporan Evaluasi Kinerja bidang Investasi



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

7.	Membuat laporan triwulan I dan triwulan II bidang Pelayanan Perizinan	Bidang Pelayanan Perizinan telah membuat dokumen dimaksud	Laporan Evaluasi binda Perizinan
8.	Membuat capaian kinerja berdasarkan program kegiatan	Terdapat dalam dokumen evaluasi renaksi tahun 2024	Dokumen Evaluasi Renaksi
9.	Membuat dokumen laporan kinerja belum menggambarkan substansi	Dokumen kinerja tahun 2024 telah menggambarkan substansi	Lakip telah menggambarkan substansi
10.	Laporan kinerja belum menggambarkan perbandingan dua tahun sebelumnya 2021 dan 2022	Dokumen kinerja tahun 2024 telah memuat perbandingan dari dokumen lakip	Telah memuat perbandingan capaian kinerja dalam dokumen lakip
11.	Laporan kinerja utama sudah berorientasi hasil namun masih terdapat target kinerja utama yang belum tercapai seperti nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pada tahun 2024, nilai SKM telah mencapai target	Dokumen SKM tahun 2024
12.	Evaluator mandiri di DPMTSP yang memiliki sertifikat perencanaan hanya 4 orang	Pada tahun 2024, sudah ada 5 orang yang memiliki sertifikat perencanaan	Sertifikat Perencanaan
13.	Belum membuat kertas kerja evaluasi tindak lanjut bidang pelayanan penanganan pengaduan dan membuat laporan evaluasi triwulan III dan IV	Telah dibuat laporan evaluasi triwulan III dan IV bidang penanganan pengaduan	Laporan Pengaduan TW III dan IV



14.	Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Hasil Rekomendasi telah dilaksanakan di tahun 2024 dan 2025	Membuat matrik tindak lanjut rekomendasi
15.	Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang belum tercapai 100%	Kinerja Utama sudah mencapai 100% yaitu tercapainya nilai realisasi investasi	Laporan Realisasi Investasi

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian adalah urutan atau struktur penyusunan suatu isi atau materi agar tersaji secara teratur, logis, mudah dipahami, dan runtut. Ini penting agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti alur informasi dengan baik dan menangkap inti dari materi yang disampaikan. Berikut disajikan sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja yaitu sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang, Tupoksi DPMTSP, Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP, Sistematika Penyajian
- Bab II : PERENCANAAN KINERJA terdiri dari Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja, Perencanaan Keuangan
- Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA terdiri dari Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja, Strategis I, Strategis II, Strategis III, Akuntabilitas Keuangan, Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024, Prestasi
- Bab IV : PENUTUP terdiri dari Kesimpulan, Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mencapai Visi ini, ada 6 (enam) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

3. Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopang dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam



- kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.
 6. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.
 7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun yang menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda adalah misi ke-2 dan misi ke-3 yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMTSP dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sedangkan

Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;



2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

3. Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMTSP Kota Samarinda kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	835 Milyar (Rp)	1 Triliun (Rp)	2,1 Triliun (Rp)	3 Triliun (Rp)	3,6 Triliun (Rp)	4,2 Triliun (Rp)	
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	91,5	92	92,5	
		Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Prosentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, biasanya antara pejabat yang berwenang (seperti pimpinan instansi atau lembaga pemerintah) dengan pegawai atau unit kerja, yang berisi komitmen untuk mencapai target atau hasil yang telah disepakati sebelumnya sehingga hasil kegiatan dapat di pertanggung jawabkan.



Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DPMTSP TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.000.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
ANGGARAN DAN PROGRAM DPMTSP TAHUN 2024

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.079.258.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 928.908.500,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 743.584.320,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 700.019.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 508.446.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.814.236.314,00
	Total Jumlah Anggaran	Rp. 21.774.452.134,00

2.3. PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan dan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek, menengah, dan panjang.



Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DPMTSP Tahun 2024 yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Belanja Pada DPMTSP (Pagu APBDP) TAHUN 2024

NO	URAIAN	PAGU (Rp)
1	Belanja Operasi	
	1. Belanja Pegawai	10.893.917.663,-
	2. Belanja Barang dan Jasa.	9.888.794.471,-
2	Belanja Modal	
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.	991.740.000,-
	2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-
TOTAL		21.774.452.134,-

Tabel 2.5

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 100.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.243.487.663,-
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.211.246.327,-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.686.000,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.615.000,-
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,-
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.763.000,-
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	455.000.000,-
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.600.000,-
	7. Fasilitas Kunjungan Tamu	28.000.000,-
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000,-
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.720.000,-
	2. Pengadaan Mebel	100.000.000,-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.940.724,-
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,-
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.464.000,-
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.242.840,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.944.760,-
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	277.390.000,-
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.136.000,-



II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	7	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : 1. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Persizinan Berusaha Berbasis Risiko	225.234.000,-
	8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	259.920.000,-
		2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	594.104.000,-
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	712.251.500,-
		2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	216.657.000,-
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	10	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	323.458.000,-
		2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Riziko	194.501.320,-
		3. Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225.625.000,-
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
	11	Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



		Sub Kegiatan : 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha 3. Pengawasan Penanaman Modal	164.439.000,- 304.490.000,- 231.090.000,-
VI		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
	12	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	508.446.000,-
		TOTAL	21.774.452.134,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Berikut disajikan tabel hasil capaian kinerja DPMTSP Kota Samarinda tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.000.000.000.000,-	Rp. 3.189.856.172.525,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 3.049.090.107.114,- PMA : Rp. 140.766.065.401,-	106,33 %	√		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5	92,75	101,36%	√		
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %	98,37 %	98,37%	√		



Keterangan :

$$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Target Realiasasi Investasi}} \times 100$$

Disadur dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, bahwa untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran /program/kegiatan maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Berdasarkan dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2024, bahwa capaian kinerjanya berada dalam kategori “Baik”. Dimana target investasi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda dapat mencapainya sebesar **106,33%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini tidak lepas dari sinergitas antara DPMPTSP, Pelaku Usaha serta OPD terkait.

Selanjutnya, ada Survei Kepuasan Masyarakat yang juga termasuk dalam indikator kinerja. Dimana Survei Kepuasan Masyarakat juga mencapai target yang ditetapkan dengan persentase **101,36%**. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi telah terpenuhi sehingga Masyarakat sebagai penerima layanan publik menjadi puas. Tercapainya target ini juga tidak lepas dari inovasi jemput bola yang dilaksanakan oleh Tim SKM DPMPTSP Samarinda. Dimana Tim SKM melaksanakan pendampingan survei langsung kepada pelaku usaha terkait pengisian survei sehingga memudahkan pelaku usaha seperti penjelasan tujuan dan fungsi pengisian SKM, verifikasi data terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.



Sedangkan untuk capaian kinerja program perangkat daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun secara keseluruhan kinerja program perangkat daerah sudah sangat baik dengan perolehan persentase **98,37%** dari 100% yang ditargetkan dengan beberapa capaian yang belum maksimal. Ketidaktercapaian ini dikarenakan adanya faktor internal yaitu masih kurangnya koordinasi antar bidang dan antar sub bidang dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat sehingga banyak terjadi miss komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap tercapainya nilai realisasi investasi di Kota Samarinda. Infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), dinilai telah memadai dalam menunjang kegiatan investasi yang secara keseluruhan telah menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah Kota Samarinda. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari implementasi berbagai inovasi layanan yang dilakukan oleh DPMTSP, salah satunya adalah sistem layanan digital SI PELATARAN, yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelaku usaha.

Selain menjadi pelaksana teknis pelayanan investasi, DPMTSP Kota Samarinda juga termasuk dalam salah satu dari empat fokus Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni Peningkatan Investasi, sebagai bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan investor. Sebagai bentuk komitmen terhadap agenda tersebut, DPMTSP Kota Samarinda terus melakukan berbagai strategi dalam mendorong peningkatan nilai realisasi investasi. Salah satu strategi yang menonjol adalah pemberdayaan dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah dan menarik minat investasi secara



berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Kota Samarinda ditunjuk sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dimana Sebagai kota penyangga Samarinda memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran proses pembangunan IKN baik dari sisi infrastruktur, logistik, maupun penyediaan sumber daya manusia. Posisi strategis ini memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Kota Samarinda. Seiring meningkatnya kebutuhan logistik dan distribusi barang untuk mendukung pembangunan IKN, Kota Samarinda berpotensi besar menjadi pusat atau gudang logistik utama dalam mendukung kelancaran pasokan kebutuhan material dan operasional di kawasan IKN. Hal ini tentu membuka peluang investasi yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk transportasi, pergudangan, manufaktur ringan, dan sektor jasa penunjang lainnya.

Agar dapat melihat capaian kinerja yang dimaksud, maka akan disajikan tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2022,2023, dan 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp.1.000.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,-	Rp.2.100.000.000.000,-	Rp.3.243.490.280.000,-	Rp.3.000.000.000.000,-	Rp.3.189.856.172.515,-
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	90	89,69	91	86,18	91,5	92,68
3.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	98,00%	100%	98,37%



Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator nilai realisasi investasi Kota Samarinda dari tahun 2022 hingga tahun 2024 secara konsisten berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar **46,43%** dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan minat investasi yang signifikan serta efektivitas strategi yang dijalankan. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi investasi mengalami **1,68%** dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tetap berada di atas target, sehingga secara umum masih mencerminkan performa yang positif dan stabil dalam mendorong pertumbuhan investasi di Kota Samarinda.

Beberapa hal yang menyebabkan turunnya nilai realisasi investasi pada tahun 2024 diantara sebagai berikut :

- a. Tahun 2024 adalah tahun politik dimana biasanya pada tahun politik itu terjadi ketidakstabilan kondisi politik menjelang masa pemilihan umum sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan besar bagi banyak pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya.
- b. Penurunan nilai realisasi investasi tahun 2024 lebih banyak di perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi sebab dari penurunan nilai tersebut.
- c. Regulasi atau kebijakan khususnya dalam sektor penanaman modal dan perizinan masih menjadi momok besar bagi pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

Berdasarkan hal tersebut, capaian realisasi investasi tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya namun sudah tercapai melebihi target indikator kinerja utama DPMTSP Kota Samarinda yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh aparatur di DPMTSP kota samarinda dan OPD Teknis Terkait melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta



sinergitas antara DPMTSP dan Pelaku Usaha. Pengembangan sistem perizinan berusaha (OSS), penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik, perbaikan sistem kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing investasi, meningkatnya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta optimalisasi pelaksanaan promosi investasi untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda.

Selain melihat target Kota Samarinda dalam pencapaian nilai realisasi investasi, maka akan disajikan pula data terkait pencapaian target nilai realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap kontribusi dari Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran dan kontribusi Kota Samarinda dalam mendukung pencapaian target investasi di tingkat provinsi, serta mengevaluasi posisi strategis Kota Samarinda sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Berikut disajikan data dan analisa terkait perbandingan capaian Realisasi Investasi Kota dengan Target Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Nilai Realisasi Investasi
(Sesuai Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1.	Nilai Investasi - Jumlah Nilai Realisasi Investasi	2022	Rp.3.299.214.703.333	Rp.1.737.419.619.789	52,67%
		2023	Rp.2.220.477.800.000	Rp.3.243.490.280.000	146,07%
		2024	Rp.4.500.000.000.000	Rp. 3.189.856.172.515	70,88%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator jumlah nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp. 3.189.856.172.515,- tercapai 70,88% dari target yang telah ditetapkan oleh Provinsi



Kalimantan Timur. Secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian telah “BAIK”. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai realisasi investasi kota samarinda mengalami kenaikan dan penurunan dari target yang telah ditentukan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi investasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 46,43% disbanding realisasi investasi tahun 2022. Realisasi investasi tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,68% dibanding realisasi invesatasi tahun 2023.

Pada Tahun 2024, Kementerian Investasi/BKPM RI menetapkan target nilai realisasi investasi untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp76 Triliun. Dalam periode yang sama, Kota Samarinda mencatat nilai realisasi investasi sebesar Rp3.189.856.172.515,-, yang berarti berkontribusi sebesar 3,95% terhadap total capaian investasi provinsi. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal capaian Kota Samarinda belum menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, namun kontribusinya tetap signifikan, mengingat posisi strategis Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan daerah, kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), serta lokasi dengan infrastruktur pendukung yang terus dikembangkan.

Selanjutnya, pada indikator kinerja terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,010% dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah rendahnya partisipasi pengguna layanan dalam mengisi Survei Kepuasan Masyarakat. Akar permasalahan dari rendahnya tingkat kesediaan pengguna layanan untuk mengisi SKM adalah minimnya pengarahan dari petugas pelayanan kepada masyarakat. Petugas belum secara optimal meyakinkan pengguna layanan agar bersedia meluangkan waktu untuk mengisi SKM setelah proses pengurusan pelayanan perizinan maupun nonperizinan selesai.



Selain itu, penurunan capaian kinerja juga dipengaruhi dengan adanya penyesuaian sistem pengisian SKM yang kini terintegrasi langsung dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Samarinda. Akibat integrasi tersebut, aplikasi SKM milik DPMTSP Kota Samarinda tidak lagi digunakan, sehingga terjadi masa transisi sistem yang turut memengaruhi kelancaran proses pengisian survei oleh masyarakat.

Namun, pada tahun 2024, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya konsistensi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda dari tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari inovasi “Jemput Bola” yang dilakukan oleh Tim SKM DPMTSP Kota Samarinda, yaitu dengan langsung turun ke lapangan dan mendatangi pengguna layanan untuk melakukan survei secara aktif. Tim SKM tidak hanya menyebarkan kuesioner, tetapi juga melakukan pendampingan dalam pengisian survei, sehingga mendorong partisipasi yang lebih tinggi dan memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat, representatif, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Upaya ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sekaligus memperkuat komitmen DPMTSP Kota Samarinda dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk capaian persentase kinerja program perangkat daerah, pada tahun 2022 penilaian masih dilakukan secara manual melalui laporan bulanan dari masing-masing bidang, dan saat itu capaian kinerja berhasil mencapai target 100%. Namun, mulai tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(DPMTSP) Kota Samarinda mulai menerapkan sistem penilaian berbasis elektronik melalui aplikasi e-TEPIAN. Pada tahun pertama implementasi sistem ini, capaian kinerja menurun menjadi 98%, atau mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh adanya proses penyesuaian terhadap penggunaan sistem baru, yang menuntut aparatur untuk mulai terbiasa dengan pelaporan yang lebih terintegrasi, real-time, dan akurat melalui sistem e-TEPIAN.

Seiring dengan peningkatan pemahaman dan adaptasi terhadap sistem tersebut, pada tahun 2024 tercatat adanya peningkatan capaian kinerja menjadi 98,37%. Kenaikan ini mencerminkan kemampuan aparatur DPMTSP dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem e-TEPIAN, baik dari segi pelaporan kinerja maupun konsistensi dalam pencapaian target program yang telah direncanakan.

Berikut diuraikan secara keseluruhan hasil pengukuran pencapaian Sasaran Strategis DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	835 M	1 T	2,1 T	3 T	3,6 T	4,2 T	4,2T
2	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	89 %	90 %	91 %	91,5 %	92 %	92,5 %	92,5 %
3	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMTSP
Kota Samarinda Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target dan Realisasi Tahun 2024		Pro-sentase
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp.14.850.000.000.000,-	Rp.5.816.468.199.789,-	Rp.3.000.000.000.000,-	Rp3.189.856.172.515,-	21,4 %
2.	Jumlah Perda	1 Perda	1 dokumen naskah akademis	1 Dokumen	-	-
3.	Jumlah Investor	31 Investor	-	-	-	-
4.	Jumlah promosi yang diselenggarakan	25 Event	12 Event	5	5	20 %
5.	Jumlah dokumen strategi promosi	5 Dokumen	-	-	-	-
6.	Jumlah izin terbit efektif	15.750 izin	18.435 Izin	2.650	16.507	104,8 %
7.	Jumlah izin terbit	21.750 izin	31.493 Izin	5.300	17.040	78,3%
8.	Jumlah LKPM yang Masuk	1500 laporan	600 Laporan	300 laporan	300 Laporan	20 %
9.	Jumlah Laporan Pengendalian	200 Laporan	553	300 Laporan	300 Laporan	150%
10.	Jumlah Pengguna Layanan Data	24.500	45.046	4.200	5.904	24%
11.	Jumlah Sistem Aplikasi	14 Aplilkasi	14 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	14,2%
12.	Jumlah Database yang diarsipkan	24.000	42.475	5.000	5.036	20,9%
13.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	94	86,16	91	92,89	98,8%
14.	Nilai AKIP	85	78,75	80,5	-	92,6%



2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hingga akhir tahun 2024, DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

3.2 STRATEGIS I : MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI

***Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu)
Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai (106,33 %)***

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “**Meningkatkan Realisasi Investasi**” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu peningkatan Nilai Investasi setiap tahun. Isu-isu strategis Penanaman Modal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Samarinda;
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Samarinda sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota;
3. Meningkatkan citra Kota Samarinda sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri;
4. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan UMKM sebagai percepatan investasi di Kota Samarinda;



5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Samarinda.

Adapun program kerja yang mendukung sasaran strategis I yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

Indikator Jumlah nilai investasi.

Tujuan dari program pengembangan iklim investasi adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor agar merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi, serta mendapatkan hasil yang maksimal dari investasi yang mereka lakukan di Kota Samarinda sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Berikut disajikan data Pencapaian indikator kinerja yang di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal.

Tabel 3.6
Perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Jumlah Regulasi yang Mendukung Investasi

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		Pro-sentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitasi insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2.	Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %



Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut: Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun 2024 dengan target sebanyak **1 Dokumen** dan tercapai Realisasi **100%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 sebanyak **2 Dokumen** tercapai **100%** dari target yang telah ditetapkan, secara keseluruhan dari 2 indikator kinerja ini capaian telah **BAIK**. Pencapaian indikator ini melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar **Rp.1.079.258.000,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp.866.642.408,-**. Persentase realisasi **80,30%**.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Rapat Koordinasi penyusunan Peta Potensi Investasi/Penanaman Modal Kota Samarinda pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai V DPMTSP Kota Samarinda dengan hasil Laporan Pendahuluan Peta Potensi Investasi Tahun 2024.
2. Rapat Koordinasi Review Rencana Umum Penanaman Modal di kota Samarinda tahun 2023-2025 pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai V DPMTSP Kota Samarinda dengan hasil /outcome Laporan Pendahuluan Penyusunan Perwali tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2025.
3. Rapat Koordinasi Review Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Samarinda tahun 2023-2025 pada tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Ruang Samarinda Hotel Puri Senyur Samarinda dengan hasil /outcome Laporan Antara Penyusunan Perwali tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2024.
4. Rapat Koordinasi penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Ruang



Rapat Lantai V DPMTSP Kota Samarinda dengan hasil /outcome Laporan Pendahuluan Peta Potensi Investasi Tahun 2024.

5. Rapat Koordinasi Review Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2025 pada tanggal 25 Juni 2024 bertempat di Ruang Samarinda Hotel Puri Senyur Samarinda dengan hasil /outcome Laporan Akhir Penyusunan Perwali tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023-2025.
6. Rapat Koordinasi Expose Aplikasi Peta Potensi Per Kecamatan pada tanggal 17 Juli 2024 di Ruang Samarinda Hotel Puri Senyur Samarinda dengan hasil /outcome Laporan Akhir Peta Investasi 2024.
7. Launching Digitalisasi Peta Potensi Investasi oleh Walikota Samarinda bertempat di Ruang Mahakam 1 Lantai 5 Hotel Harris Samarinda dengan hasil/outcome Laporan Tutoriao Peta Investasi Kota Samarinda.

Adapun Masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 yakni:

Terkendala dalam tahap Pengesahan Naskah Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Secara keseluruhan capaian kinerja dalam penyusunan dokumen Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dimana indikator yang harus dicapai sebanyak 1 dokumen perda berupa naskah akademis, rancangan perda dan penetapan perda. Sedangkan untuk capaian kinerja dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Potensi pada tahun 2023 lalu baru menyelesaikan dokumen Peta Potensi, dimana pada tahun 2024 ini telah menyelesaikan kegiatan expose aplikasi peta potensi secara digital dan dokumen RUPM tahun 2024.



2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pameran dan Non Pameran Dalam dan Luar Kota Wilayah Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kota Samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024 :

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi

NO	INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		%
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya Event Promosi Investasi	3 Event	3 Event (Pameran 2 Temu Usaha 1)	5 Event	5 Event (Pameran 2 Temu Usaha 3)	5 Event	5 Event (Pameran 2 Temu Usaha 3)	100 %
		Kategori "BAIK"						

- Analisis Pencapaian target dengan terlaksananya kegiatan promosi pameran yang terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah Samarinda. Pencapaian indikator ini melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar **Rp. 928.908.500,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 893.962.827,-** Persentase realisasi **96,24 %**. Realisasi target yang dapat dicapai dari anggaran yang diserap sebanyak **100%** dengan mengikuti **2 event** di beberapa wilayah dalam dan luar wilayah kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan pameran yang dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pameran luar wilayah Kalimantan Timur dengan anggaran sebesar **Rp.712.251.500,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp.691.256.827,-** persentase realisasi **97,05 %**. Dalam rangka menampilkan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan



daerah dan produk kreatif serta menyebarluaskan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan.

- Analisis pencapaian target non pameran dengan anggaran sebesar **Rp. 216.657.000,-** dengan serapan anggaran sebesar Rp. **202.706.000,-** persentase realisasi **98,62%**. Realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 %. Kegiatan kerjasama non pameran yang dilaksanakan ini berhasil memberikan fasilitas kemudahan berusaha dalam bentuk Pelayanan Perizinan dan Klinik Investasi, Memberikan ruang atau tempat dalam kegiatan event temu usaha untuk UMKM pelaku usaha besar dan para investor dalam rangka promosi investasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja adalah :

1. Kegiatan Pameran Indonesia City Expose 20 Rakernas APEKSI XVII Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juni 2024 bertempat di Kota Balikpapan.
2. Kegiatan Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juni 2024 di Kota Batam.
3. Kegiatan Temu Usaha yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan narasumber dan peserta yang berbeda, yang diselenggarakan pada tanggal 12 dan 14 Agustus bertempat di Hotel Puri Senyur Samarinda yang diikuti oleh 150 Pelaku UMKM.
4. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2024 bertempat di Hotel Puri Senyur Samarinda, menghadirkan Tim Tenaga Ahli yang dihadiri 50 Peserta.
5. Terlaksananya pelaksanaan Promosi Temu Usaha Pelaku UMKM dengan Retail Besar di Kota Samarinda.



6. Tersusunnya Dokumen Kajian Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kota Samarinda.

Selain upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja juga terdapat masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu :

1. Tidak semua Pelaku Usaha/UMKM mengikuti kegiatan dimaksud dikarenakan adanya kesesuaian anggaran, sehingga peserta kegiatan harus dibatasi dan menyesuaikan.
2. Terdapat beberapa retail besar yang belum berminat untuk menjadi narasumber dalam kegiatan temu usaha.
3. Adanya persyaratan-persyaratan dari retail besar terhadap Pelaku Usaha/UMKM dalam memasarkan produknya.

Secara keseluruhan capaian kinerja dalam terlaksananya event promosi investasi dari tahun 2022 hingga 2024 sudah baik. Namun dikarenakan keterbatasan APBD Kota Samarinda sehingga DPMTSP tidak dapat mengikuti semua event-event promosi investasi yang diadakan diluar daerah Kalimantan maupun luar negeri. Pada tahun 2024 target promosi sama dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya prioritas yang dilakukan pemerintah kota samarinda untuk mengikuti event promosi investasi tertentu yang dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Samarinda.

3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala terus di upayakan oleh DPMTSP untuk meningkatkan laporan realisasi investasi.



Tabel 3.8
Perbandingan capaian kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Investasi	Rp.1.000.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.789,-	Rp.2.100.000.000.000,-	Rp.3.243.490.280.000,-	Rp.3.000.000.000.000,-	Rp.3.189.856.172.515,-
2.	Jumlah Laporan Pengendalian	200 Laporan	353 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	300 Laporan	300 Laporan
3.	Jumlah LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM
4.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50 Kegiatan Usaha	353	100 Kegiatan Usaha	103 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha
5.	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	30 Pelaku Usaha	300	50 Pelaku Usaha	233 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha
6.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha
KATEGORI" BAIK"							

Analisis dan Evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut : Capaian indikator kinerja jumlah investasi tahun 2024



sebesar Rp. 3.189.856.172.515,- tercapai 106,30 % dari target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian **Baik**. Pencapaian indikator ini melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 700.019.000,- yang terserap Rp. 605.546.991,- persentase realisasi 86,52 % dari anggaran yang terserap, kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

- Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya.
- Meningkatnya jumlah laporan pengendalian pelaku usaha.
- terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (sektor perparkiran) dilaksanakan 1 (satu) kali pada tanggal 22 Mei 2024 di Hotel Puri Senyur. Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perparkiran di Kota Samarinda serta narasumber yang hadir adalah dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Dinas PUPR Kota Samarinda. Hasil dari kegiatan ini adalah memfasilitasi para pelaku usaha perparkiran di Kota Samarinda yang wajib menyelesaikan proses perizinan sesuai dengan yang dipersyaratkan agar sertifikat standar para pelaku usaha tersebut bisa diterbitkan.
- Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Sub Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi dilaksanakan 4 (empat) kali pada tanggal 19 Juni, 25 Juni, 2 Juli, dan 26 September 2024 bertempat di Hotel Puri Senyur dan Hotel Mercure Samarinda. Kegiatan dihadiri oleh 200 pelaku usaha (50 pelaku usaha dengan kategori pelaku usaha UMK maupun Non UMK per masing-masing tanggal pelaksanaan).



Narasumber pada kegiatan ini adalah dari DPMTSP Provinsi Kaltim. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang proses perizinan berusaha melalui sistem serta memberikan informasi mengenai laporan kegiatan penanaman modal di mana laporan kegiatan penanaman modal tersebut merupakan dasar dan acuan penghitungan nilai realisasi investasi suatu daerah.

- Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal ke pelaku usaha. Sub Kegiatan pengawasan penanaman modal dilakukan kepada pelaku usaha di Kota Samarinda dengan total kegiatan usaha sebanyak 200 kegiatan usaha. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi melalui laporan berkala (LKPM) serta pemeriksaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administrasi fisik meliputi pengecekan lokasi kegiatan usaha dan realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lain terkait pelaksanaan penanaman modal.

Adapun masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 yakni:

1. Masih terdapat pelaku usaha yang ditemukan belum melakukan pembaharuan data perizinan berusaha ke sistem perizinan yang terbaru yaitu OSS RBA.
2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melengkapi dokumen-dokumen legalitas perizinan berusaha terkait usaha yang dijalankan.
3. Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tentang kewajiban pelaporan LKPM setiap periodenya.
4. Kewajiban dalam melaksanakan kemitraan dengan UMKM belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan perubahan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adanya penyandingan sub-sub kegiatan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal sehingga diperlukan penyesuaian target capaian kinerja sesuai nomenklatur terbaru. Namun perubahan Kepmendagri tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja di tahun 2024. Dimana secara keseluruhan tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan predikat baik.

3.3 STRATEGIS II : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1I (Dua)

Capaian Indikator Kinerja tersebut sebesar 101,51 %

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya. Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di DPMTSP yang dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

No.	INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90	89,69	91	86,18	91,5	92,75	101,36
		Kategori “SANGAT BAIK”						

Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan SKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah – langkah penyusunan Laporan SKM pada DPMTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data



Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk seluruh layanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan, maupun layanan berbantuan OSS yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan telah dicapai 335 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan yang telah mencapai 335 responden maka diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 92,75** Dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100.
3. Untuk nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dari seluruh jenis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	RATA-RATA
1.	Persyaratan	3.67
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.71
3.	Waktu Penyelesaian	3.65
4.	Biaya/Tarif	3.91
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.62
6.	Kompetensi Pelaksana	3.63
7.	Perilaku Pelaksana	3.70

8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	3.78
9.	Sarana dan Prasarana	3.73

4. NRR (Nilai Rata-Rata) Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diterima yakni :

Dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, dengan menetapkan responden dari pengguna pelayanan. Diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

NRR (Nilai Rata-Rata) Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diterima yakni :

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$SKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

$$SKM = 3,71 \times 25$$

$$SKM = 92,75$$

5. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,41 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan kembali.
6. Dari Tabel dapat dilihat bahwa kesemua unsur pelayanan memiliki Nilai (NRR) yang BAIK dengan nilai (NRR) tertinggi adalah Unsur biaya/tarif (NRR 3,91), Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi berdasarkan penilaian responden adalah unsur Biaya/Tarif. Nilai Rata-Rata kesemua unsur lebih dari 3,41, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda umumnya sudah baik dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.



Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, walaupun nilai rata-rata semua unsur menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Selain itu untuk unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap ditingkatkan. Dan 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat diatas 3,41 mutu pelayanan A (sangat Baik).

7. Beberapa unsur kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni :
 - a) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (NRR 3.62)
 - b) Kompetensi Pelaksana (NRR 3.63)

Berdasarkan hasil Indeks SKM yang telah dilakukan secara terus menerus maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa upaya perbaikan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Penanaman Modal, dan layanan berbantuan OSS khususnya kepada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, serta Kompetensi Pelaksana, karena peraturan pusat yang tumpang tindih dan berubah-ubah sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi aparatur DPMTSP seperti melaksanakan Bimbingan Teknis terkait teknis pelayanan perizinan dan non perizinan

Tujuan dari upaya ini adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan yang berorientasi pada peningkatan minat dan realisasi investasi dari dunia usaha. Hal ini dilakukan guna mendukung pembangunan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban melalui percepatan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan prima yang diharapkan diarahkan untuk mencapai akuntabilitas pelayanan publik, yang mencakup efisiensi dalam hal biaya, waktu, proses, dan hasil layanan. Dimana artinya bahwa pemerintah atau lembaga pelayanan harus transparan, jujur, dan dapat dipercaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.



Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung dengan program kegiatan :

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk, baik itu investasi domestik maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Sehingga harus berpedoman pada asas kemudahan berusaha. Pada tahun 2024, Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik. Dimana Pencapaian indikator kinerja berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan adalah 100% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 3.11
Perbandingan capaian kinerja Indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin

No.	Indikator Kinerja	Capaian						Pro sentase
		2022		2023		2024		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Pelaku Usaha Yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2.550	17.595	2.600	840	2.600	16.507	100 %
2.	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan	3.550	19.888	3.600	6.687	5.200	17.046	100 %
3.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan	5.100	15.244	5.200	17.086	240	542	100 %
4.	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi pengaduan	40	81	40	57	40	1.257	100 %
		KATEGORI” BAIK”						

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas adalah



sebagai berikut : Capaian indikator kinerja untuk Bidang Pelayanan Perizinan dari 4 target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 keseluruhan terget-target yang ditetapkan tercapai 100% dengan kategori **BAIK**. Pencapaian seluruh indikator ini melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran yang pada anggaran perubahan ada pengurangan anggaran sebesar **Rp. 142.161.680,-** sehingga pada akhir anggaran tahun 2024 total anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar **Rp. 743.584.320,-** dengan serapan anggaran sebesar Rp. **609.635.361,-** presentase realisasi anggaran 81,98%. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dengan menyediakan SDM yang berintegritas untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.
2. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung sehingga proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan maksimal. Penyediaan sarana seminar kit sebagai peralatan pendukung untuk penyelenggaraan acara Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Olahan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan (SP) Perizinan.
3. Rapat koordinasi dan evaluasi tim teknis penyelenggaraan pelayanan melalui OSS yang diselenggarakan pada hari rabu, 26-6-2024. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah teknis dan evaluasi terkait kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan yang telah terintegrasi secara elektronik agar terwujudnya proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan



standar yang telah ditetapkan.

4. Rapat Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan dan Pengawasan di OSS Berbasis Risiko pada tanggal 02 Juli 2024. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait persyaratan perizinan melalui sistem informasi DPMTSP, informasi terkait dashboard masing-masing akun di bidang yang terdaftar di OSS. Melalui akun Bidang Pengendalian dan Pengawasan dapat melakukan pengawasan untuk sinkronisasi data karena banyak kegiatan usaha yang ada di sistem OSS perizinannya tidak sesuai dengan data yang di input pada saat mendaftar. Untuk bidang data tujuan akun untuk mengetahui jumlah data pelaku usaha yang ada di OSS.
5. Rapat Review SP (Standar Pelayanan Perizinan) pada tanggal 15-16 Juli 2024, membahas terkait Standar Pelayanan yang bertujuan untuk sinkronisasi dan evaluasi standar pelayanan yang tersusun sebelum di publish ke pelaku usaha. Sehingga masih perlu adanya penyesuaian beberapa unsur agar SP lebih sederhana dan jelas, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat terutama pada unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur.
6. Rapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada tanggal 03 Juli 2024, Rapat ini bermaksud untuk Integrasi AMDALNET kedalam OSS dan PB UMKU. Dengan tujuan mengenalkan sistem AMDALNET yang terintegrasi dengan OSS serta memberikan informasi terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam upload dokumen lingkungan pada sistem AMDALNET yang terintegrasi dengan OSS. Dengan adanya integrasi ini diharapkan Perangkat Daerah teknis dapat memverifikasi berkas persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha yang ada di akun hak akses perangkat daerah teknis.



7. Bimbingan Teknis Perzinan Berusaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui OSS RBA pada tanggal 09 Juli 2024. Maksud kegiatan ini yakni untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan pendampingan pelayanan perizinan SPP-IRT kepada masyarakat.
8. Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan (SP) perizinan pada DPMTSP Kota Samarinda pada tanggal 18 Juli 2024. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi pelayanan. Dengan adanya SP diharapkan dapat memberikan standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan.
9. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Reklame dan Penerbitan Surat Izin Praktek (SIP).
10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Layanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan dengan melaksanakan BIMTEK untuk seluruh petugas tenan di DPMTSP dan MPP Samarinda.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Capaian Kinerja :

1. Belum optimalnya integrasi pelayanan masing-masing tenan dengan aplikasi yang ada di DPMTSP.
2. Terdapatnya gangguan pada system aplikasi OSS secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan pengunduhan data untuk pelaporan.
3. Terdapatnya gangguan system jaringan untuk aplikasi SIPO yang dikelola Diskominfo.



Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Capaian Kinerja:

1. Menyediakan media untuk kemudahan pelaku usaha dalam melakukan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dan SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha.
2. Tersedianya wadah pengaduan proses penyelenggaraan perizinan baik secara online maupun tatap muka mempersiapkan SDM yang berintegritas dalam memberikan pelayanan konsultasi pelayanan perizinan.
3. Memberikan Bimtek proses pengisian aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha.
4. On Job Training proses penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
5. Adanya system antrian pengunjung yang telah terintegrasi di semua tenan sehingga pendataan pelaku usaha yang dilayani di masing-masing tenan dapat terdata dengan baik.
6. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS.
7. Melakukan bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis agar proses verifikasi terkoordinasi dengan cepat.
9. Rapat teknis penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
10. Melakukan audiensi dengan fakultas kedokteran unmul samarinda terkait penerbitan izin kesehatan melalui aplikasi MPP digital.

Capaian kinerja pelayanan penanaman modal dari tahun 2022 hingga tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana setiap



masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan layanan di DPMTSP Kota Samarinda mendapatkan pelayanan prima seperti layanan perbantuan OSS, layanan konsultasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan serta mendapatkan pemantauan terkait pemenuhan kewajiban perizinan berusaha.

Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMTSP pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi MPP Digital
Tahun 2024

No.	Nama Izin	Jumlah	Ket
	Tenaga Kesehatan		
1.	Izin Praktek Dokter	377	
2.	Izin Praktek Dokter Gigi	91	
3.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	26	
4.	Izin Praktek Dokter Spesialis	166	
5.	Izin Praktek Dokter Intersip	61	
6.	Izin Praktek Perawat	1.203	
7.	Izin Praktek Bidan	380	
8.	Izin Praktek Apoteker	277	
9.	Izin Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	33	
10.	Izin Praktek Tenaga Vokasi Farmasi	243	
11.	Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan (SIKTS)	28	
12.	Izin Praktek Tenaga Gizi (SIP-Gz)	40	
13.	Izin Praktek Fisioterapi (SIPF)	46	
14.	Izin Praktek Okupasi Terapis	2	
15.	Izin Praktek Akupuntur Terapis	-	
16.	Izin Praktek Perekam Medis (SIK PM)	30	
17.	Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris (SIPRO)	6	
18.	Izin Praktek Optometris	-	
19.	Izin Praktek Teknisi Gigi	-	
20.	Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)	12	
21.	Izin Praktek Radiografer (SIPRad)	44	
22.	Izin Praktek Elektromagnetis (SIP-E)	12	
23.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	136	



24.	Izin Praktek Ortosis Protesis	-	
25.	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskular	-	
26.	Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK)	4	
27.	Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)	6	
JUMLAH		3.223	

Tabel 3.13
Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) Tahun 2024

No.	Nama Izin	Jumlah	Ket
Tenaga Kesehatan			
1.	SIPP Pencabutan	27	
2.	SIPA CABUT	57	
3.	BIDAN PENCABUTAN	-	
4.	Penyehat Tradisional	-	
5.	SIPFM (Surat Izin Praktik Fisikawan Medis)	3	
6.	Izin Dokter Pencabutan	21	
7.	Izin Kefarmasian Pencabutan	16	
8.	Izin Fisioterapi Pencabutan	-	
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	-	
10.	Izin Epidemiolog	-	
Sarana Pelayanan Kesehatan			
1.	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLU	1	
2.	Izin Operasional Klinik Pemerintah	1	
Non Kesehatan			
1.	MIKOL	10	
2.	REKLAME TETAP	-	
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	6	
4.	Pengumpul Uang	-	
5.	Pendidikan (PAUD)	-	
6.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	122	
7.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	175	
8.	Pengaduan	1.257	
JUMLAH		1.696	



2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal kebijakan investasi dan untuk mempermudah pemantauan serta evaluasi investasi yang masuk.

Pencapaian kinerja pelayanan saat ini sangat bergantung pada penerapan Sistem Aplikasi IT DPMTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Pengembangan Aplikasi IT DPMTSP Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Capaian						Pro sentase
		2022		2023		2024		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Pengguna Layanan Data	4.000	40.939	4.100	4.107	4.200	5.904	140,57%
2.	Jumlah Sistem Aplikasi	1	1	2	2	2	2	100%
3.	Jumlah Data Base	4.000	20.796	4.100	21.680	5.000	5.036	100,72%
		Kategori “BAIK”						

Analisis pencapaian target kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut, capaian indikator kinerja jumlah pengguna layanan tahun 2024 sebesar **5.904**, tercapai 140,57 %, capaian indikator kinerja jumlah sistem aplikasi tahun 2024 sebesar **2**, tercapai 100%. Capaian indikator kinerja jumlah kegiatan database tahun 2024 sebesar **5.036** tercapai 100,72% , capaian indikator kinerja jumlah kegiatan publikasi informasi PTSP tahun 2024



sebesar **699** tercapai 129,09% dari target yang telah ditetapkan, secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian **Baik**. Pencapaian indikator ini melalui program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran murni sebesar **Rp. 608.446.000,-** kemudian pada pengurangan pada anggaran perubahan menjadi **Rp. 508.446.000,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 502.689.870,-** dengan prosentasi realisasi 98,86%. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi SiPelataran Berbasis Android pada bulan Februari 2024 dan selesai pada bulan April 2024
2. Melakukan pemesanan dan pembelian komputer server pada bulan Februari guna untuk meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi yang ada di DPMTSP dan MPP Kota Samarinda
3. Melakukan kegiatan Podcast dengan tamu atau narasumber dari instansi terkait yang berada di MPP Kota Samarinda guna untuk menyampaikan Informasi pelayanan apa saja yang ada di MPP Kota Samarinda
4. Melaksanakan peng-*input*-an berkas perizinan ke dalam aplikasi Arsiparis
5. Melakukan peliputan dan dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMTSP atau MPP Kota Samarinda.
6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan guna untuk me-management penggunaan jaringan internet agar lebih aman dan lancar.
7. Melakukan pembelian perangkat hardware jaringan guna meningkatkan keamanan jaringan
8. Melaksanakan rapat Pembahasan pembuatan aplikasi SiPena Persahabatan yang digunakan untuk me-management barang pakai habis dan inventaris barang tetap

Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu :



Tidak terjadi kendala apapun dalam mencapai target kinerja, pagu anggaran terserap dan kegiatan terlaksana dengan baik.

Dari capaian kinerja dalam program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 capaian kinerja melebihi target dikarenakan pengarsipan secara digital data pelayanan perizinan dan non perizinan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 hanya mengelola dan mengolah data secara digital sesuai tahun berjalan.

3.4 STRATEGIS III : MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT

***Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III (tiga)
Capaian Indikator Kinerja tersebut sebesar 100 %***

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Dari seluruh program yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah tercapai 98,37% dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah sebesar 91,68% dalam capaian kinerja program perangkat daerah. adapun rincian capaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		PRO SENTASE
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

2.	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.	Terpeliharanya barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
Kategori “ BAIK “								

Pencapaian target ini dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD sehingga tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan baik. Perolehan capaian ini juga didukung beberapa kegiatan penilaian dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada DPMTSP yakni panji-panji keberhasilan di bidang pelayanan publik. Penilaian dan evaluasi oleh pemerintah pusat pada DPMTSP antara lain Wilayah Birokrat Bersih dan Melayani, Role Model, rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada DPMTSP tahun 2024.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan adalah tanggung jawab untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku, agar setiap penggunaan uang terutama uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2024, DPMTSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Tabel 3.16
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda		21.774.452.134,00	98,37%	20.188.551.727,00	92,72%	Sub Unit
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Program
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	90,40%	72.054.500,00	72,05%	Sub Kegiatan
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	96,40%	39.774.500,00	79,55%	Sub Kegiatan
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	89,60%	28.564.000,00	57,13%	Sub Kegiatan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.243.487.663,00	100,00%	9.538.570.527,00	93,12%	Sub Kegiatan
	5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.211.246.327,00	100,00%	1.204.758.810,00	99,46%	Sub Kegiatan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Sub Kegiatan
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.686.000,00	100,00%	111.621.100,00	99,94%	Sub Kegiatan
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.615.000,00	100,00%	341.824.900,00	96,67%	Sub Kegiatan
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	100,00%	58.896.300,00	98,16%	Sub Kegiatan
	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.763.000,00	100,00%	32.672.500,00	99,72%	Sub Kegiatan
	10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	455.000.000,00	100,00%	452.985.250,00	99,56%	Sub Kegiatan
	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.600.000,00	100,00%	31.517.500,00	99,74%	Sub Kegiatan
	12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	100,00%	25.237.500,00	90,13%	Sub Kegiatan
	13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000,00	100,00%	451.595.120,00	98,17%	Sub Kegiatan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

	14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.720.000,00	100,00%	353.570.000,00	98,56%	Sub Kegiatan
	15. Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100,00%	89.450.500,00	89,45%	Sub Kegiatan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.940.724,00	100,00%	627.174.113,00	91,03%	Sub Kegiatan
	17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	100,00%	119.340.000,00	99,45%	Sub Kegiatan
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.464.000,00	100,00%	2.121.393.600,00	94,26%	Sub Kegiatan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.242.840,00	69,90%	88.966.500,00	60,01%	Sub Kegiatan
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.944.760,00	98,31%	149.100.900,00	93,32%	Sub Kegiatan
	21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.390.000,00	97,99%	267.114.500,00	96,30%	Sub Kegiatan
	22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.136.000,00	100,00%	503.788.650,00	99,93%	Sub Kegiatan
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Program
7.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	23.Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225.234.000,00	21,31%	33.878.720,00	15,04%	Sub Kegiatan
8.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kegiatan
	24. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	259.920.000,00	100,00%	255.823.122,00	98,42%	Sub Kegiatan



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

	25. Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	594.104.000,00	99,67%	576.940.566,00	97,11%	Sub Kegiatan
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Program
9.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	26. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	712.251.500,00	99,71%	691.256.827,00	97,05%	Sub Kegiatan
	27. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	216.647.000,00	98,62%	202.706.000,00	93,56%	Sub Kegiatan
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Program
10.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan
	28. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	323.458.000,00	98,79%	304.247.539,00	94,06%	Sub Kegiatan
	29. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	194.501.320,00	97,80%	167.724.672,00	86,23%	Sub Kegiatan
	30. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	225.625.000,00	65,37%	137.663.150,00	61,01%	Sub Kegiatan
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Program
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	31. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	164.439.000,00	91,66%	140.599.084,00	85,50%	Sub Kegiatan
	32. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	304.490.000,00	100,00%	300.141.252,00	98,57%	Sub Kegiatan
	33. Pengawasan Penanaman Modal	231.090.000,00	100,00%	164.909.655,00	71,36%	Sub Kegiatan
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Program
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan



34. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	508.446.000,00	100,00%	502.689.870,00	98,87%	Sub kegiatan
--	----------------	---------	----------------	--------	--------------

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2024 pada APBD murni mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 25.105.282.933,-** (Dua puluh lima milyar seratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pada APBD perubahan dilakukan penyesuaian anggaran sehingga DPMPTSP mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 21.774.452.134,-** (Dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) .

Dari plafon anggaran, terserap sebesar **Rp. 20.188.551.727,-** (Dua puluh milyar seratus delapan puluh delapan lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 92,72 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 ini sudah sangat baik, karena lebih tinggi realisasi fisik sebesar 98,37 % daripada realisasi keuangan sebesar 92,72% dimana pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran di DPMPTSP Kota Samarinda telah berjalan dengan efektif dan efisien. Dimana Penyerapan anggaran yang baik memiliki berbagai dampak positif, baik bagi organisasi maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi DPMPTSP Kota Samarinda untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja khususnya penyerapan anggaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



3.6. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024

Tabel 3.17
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD-P	Realisasi			Ket/Efisiensi
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	21.774.452.134	98,37	20.188.351.727	92,27	1.586.900.407
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.814.236.314	99,61	16.709.971.270	93,80	1.104.265.044
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	91,70	140.393.000	70,20	59.607.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	90,40	72.054.500	72,05	27.945.500
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	96,40	39.774.500	79,55	10.225.500
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	89,60	28.564.000	57,13	21.436.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.454.733.990	100	10.743.329.337	93,79	711.404.653
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.243.487.663	100	9.538.570.527	93,12	704.917.136
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.211.246.327	100	1.204.758.810	99,46	6.487.517
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.532.664.000	100	1.506.350.170	98,28	26.313.830
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.686.000	100	111.621.100	99,94	64.900
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.615.000	100	341.824.900	96,67	11.790.100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	100	58.896.300	98,16	1.103.700
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.763.000	100	32.672.500	99,72	90.500
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	455.000.000	100	452.985.250	99,56	2.014.750
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.600.0000	100	31.517.500	99,74	82.500
1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	100	25.237.500	90,13	2.762.500
1.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	100	451.595.120	98,17	8.404.880
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.720.000	100	443.020.500	96,58	15.699.500
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.720.000	100	353.570.000	98,56	5.150.000
1.4.2	Pengadaan Mebel	100.000.000	100	89.450.500	89,45	10.549.500
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.059.404.724	100	2.867.907.713	93,74	191.497.011



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.940.724	100	627.174.113	91,03	61.766.611
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	100	119.340.000	99,45	660.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.464.000	100	2.121.393.600	94,26	129.070.400
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.713.600	92,20	1.008.970.550	91,00	99.743.050
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.242.840	69,90	88.966.500	60,01	59.276.340
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.944.760	98,31	149.100.900	83,32	29.843.860
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.390.000	97,99	267.114.500	96,30	10.275.500
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.136.000	100	503.788.650	99,93	347.350
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.079.258.000	83,39	866.642.408	80,30	212.615.592
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	225.234.000	21,31	33.878.720	15,04	191.355.280
2.1.1	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225.234.000	21,31	33.878.720	15,04	191.355.280
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	854.024.000	99,77	832.763.688	97,51	21.260.312
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	259.920.000	100	255.823.122	98,42	4.096.878
2.2.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	594.104.000	99,67	576.940.566	97,11	17.163.434
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	928.908.500	99,45	893.962.827	96,24	34.945.673
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	928.908.500	99,45	893.962.827	96,24	34.945.673
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	712.251.500	99,71	691.256.827	97,05	20.994.673
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	216.657.000	98,62	202.706.000	93,56	13.951.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	743.584.320	88,39	609.635.361	81,99	133.948.959
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	743.584.320	88,39	609.635.361	81,99	133.948.959



Laporan Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024

4.1.1	Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	323.458.000	98,79	304.247.539	94,06	19.210.461
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	194.501.320	97,80	167.724.672	86,23	26.776.648
4.1.3	Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	225.625.000	65,37	137.663.150	61,01	87.961.850
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	700.019.000	98,04	605.649.991	86,52	94.369.009
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.019.000	98,04	605.649.991	86,52	94.369.009
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	164.439.000	91,66	140.599.084	85,50	23.839.916
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	304.490.000	100	300.141.252	98,57	4.348.748
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	231.090.000	100	164.909.655	71,36	66.180.345
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	508.446.000	100	502.689.870	98,87	5.756.130
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.446.000	100	502.689.870	98,87	5.756.130
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	508.446.000	100	502.689.870	98,87	5.756.130
	TOTAL	21.774.452.134	98,37	20.188.551.727	92,72	1.586.900.407

Dari pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh DPMTSP Kota Samarinda selama tahun 2024 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil melakukan efisiensi pemakaian Dana Sebesar Rp. 1.586.900.407,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) 7,28 % dari total anggaran tahun 2024.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

- Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2024.



3.7 PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, DPMTSP Kota Samarinda juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- a. Penilaian MCP Korsupgah Perizinan dengan Predikat Zona Hijau
- b. Juara 2 Stand Terbaik Pameran Kaltim Expo
- c. Juara 1 Stand Terbaik Pameran Malang SMEITT
- d. Juara 2 Penyusunan Laporan Keuangan
- e. Penilaian Percontohan Pelayanan Publik dari Kementrian Hukum dan HAM RI
- f. Penilaian AKIB-RB DPMTSP Tahun 2022 dengan Predikat “BB”
- g. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “A” “Pelayanan Prima”
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggara Ombudsman RI)
- i. Penilaian Bidang Pelayanan Publik (Panji-panji Keberhasilan PTSP dan Daya Saing Daerah)
- j. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB
- k. Juara 2 Kategori Pelayanan Publik Pada Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023
- l. Juara 3 Kategori Pelayanan Publik Pada Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023
- m. Penghargaan Inovasi PRISMA sebagai Juara Favorit Katagori Tata Kelola Pemerintahan Lomba Inovasi Baimbai Tahun 2024



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam kurun waktu Tahun 2024. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK” dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (*building learning organization*) melalui team work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (*plan*) – kerjakan (*do*) – evauasi (*chek*) – inovasi perbaikan (*action*), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.
2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.
3. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses



- perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
4. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien;
 5. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 7. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesuai dengan perkembangan teknologi. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai.
 8. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanan dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.
 9. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.
 10. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Samarinda khususnya bagian organisasi agar dapat mengadakan bimbingan teknis terkait Pelaporan Kinerja 2 bulan sebelum laporan disusun.



2. Agar Perangkat daerah diberikan Petunjuk Teknis terkait penyusunan Laporan Kinerja agar penulisan laporan nya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Serta untuk melihat sejauh mana kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dapat tercapai.

Dimana Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu berdampak positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 25 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Julia Noor, S.I.P

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19650717 198609 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : Wali Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,



(ANDI HARUN)

Pihak Pertama,



JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp.3.000.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %

Program	Anggaran
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.154.258.000,00
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 947.637.000,00
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 885.746.000,00
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 700.019.000,00
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 608.446.000,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.809.176.933,00

Kota Samarinda, 7 Februari 2024

WALI KOTA SAMARINDA



(ANDI HARUN)

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Email : dpmptsp.smd@gmail.com Website : dpmptsp.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1 / 128 / 100.20

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021 s/d 2026.
- KEDUA :
- : Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 6 Februari 2024



KEPALA DINAS

Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19711030 199403 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

TUGAS : “Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

SASARAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 : 1. Nilai Realisasi Investasi = Rp. 3.000.000.000.000,-
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 91,5
3. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah = 100 %

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan penelitian pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Rp. 3.000.000.000.000,-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	SKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	91,5	
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas Kinerja dan Pelayanan pada Perangkat Daerah untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Ketentuan dan aturan yang berlaku.	$= \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja Program}}{\text{Target Capaian Kinerja Program}} \times 100\%$	100 %	



Samarinda, 6 Februari 2024
Kepala Dinas

Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19711030 199403 1 002



MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		URAIAN	SATUAN			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	milyar (Rp)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Dokumen Perencanaan PD Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Rp. Dokumen Dokumen	100.000.000,- 7 7
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Rp. Dokumen Dokumen	50.000.000,- 3 3
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Input</u> Dana : Output :	Rp. Laporan	50.000.000,- 1



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
					Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. orang laporan	13.672.633.000,- - 71 7
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah dokumen penyediaan administrasi Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Dokumen Laporan	1.326.795.000,- - 3 7
					Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Paket	Rp. Paket	91.686.000,- 1



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

							Komponen Listrik yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Laporan	10
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Paket Laporan	523.615.000,- 7 10
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Peralatan Rumah Tangga Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Paket Laporan	60.000.000,- 10 10
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Paket Laporan	26.763.000,- 15 10



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Paket Laporan	430.000.000,- 15 10
						Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Dokumen Laporan	39.600.000,- 10 10
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Laporan Laporan	22.000.000,- 15 10
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	<u>Input</u> Dana :	Rp.	360.000.000,-



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

						dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Outcome : Jumlah Laporan	Laporan Laporan	10 10
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Unit Laporan	318.720.000,- 2 2
						Pengadaan Mebel	<u>Input</u> Dana : Output : Jml paket mebel yg disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Unit Laporan	100.000.000,- 2 2
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah laporan Penyediaan	Rp. Laporan	1.109.571.333,- 36



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					Daerah		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Laporan	3
						Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jasa dan <u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Laporan	120.000.000,- 2
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Laporan	1.405.080.000,- 3
								Laporan	3



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Unit Laporan	220.480.300,- 6 4
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Kendaraan dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Unit Laporan	150.707.300,- 7 4
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara Outcome : Jumlah	Rp. Unit Laporan	227.390.000,- 3 4



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

							Laporan		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome : Jumlah Laporan	Rp. Unit Laporan	404.136.000,- 1 4
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya di harmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya di harmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko Outcome : Tersedianya Perda Pemberian Insentif Penanaman Modal	Rp. Dokumen Perda	300.234.000,- 1 1



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota <u>Outcome</u> : Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Rp. Dokumen	259.920.000,- 1
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah peta potensi investasi kabupaten/kota Outcome : Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Rp. Dokumen	594.104.000,- 1
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah	Rp. Dokumen	216.657.000,- 1



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Peraturan Daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota Outcome : Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	1
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota Outcome : Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Rp. Dokumen	730.980.000,- 2
								Event	5
				PROGRAM PELAYANAN	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui	<u>Input</u> Dana : Output :	Rp.	334.078.000,-



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					PENANAM AN MODAL	secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik Outcome : Tersedianya Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	5300
									Pelaku usaha	5300
							Pemantauan, analisis, evaluasi da pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah kegiatan usaha Pemantauan, analisis, evaluasi da pelaporan di bidang	Rp. Kegiatan usaha	265.225.000,- 240



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

							perizinan berusaha berbasis risiko Outcome : Tersedianya kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	5300
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Layanan Konsultasi perizinan Outcome : Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan	Rp. Orang	286.443.000,- 40
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Pelaku Usaha	5300
							<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan	Rp. Kegiatan Usaha	164.439.000,- 50



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					Kabupaten/Kota		yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Outcome : Terlaksananya Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Pelaku Usaha	300
						Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan berbasis risiko Outcome : Terlaksananya Bimtek/sosialis	Rp. Pelaku Usaha	304.490.000,- 70
								Pelaku Usaha	300



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

							asi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan berbasis risiko		
						Pengawasan Penanaman Modal	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. kegiatan Usaha Pelaku Usaha	231.090.000,- 200 200
				PROGRAM PENGELOLAN DATA DAN	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	<u>Input</u> Dana : Output : Jumlah Data	Rp. Dokumen	608.446.000,- 5000



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

					SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Database	5000
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	---	--	----------	------

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	100,00%	Rp58.896.300	98,16%	Rp1.103.700
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp32.763.000	Rp32.763.000	Rp32.763.000	Rp0	100,00%	Rp32.672.500	99,72%	Rp90.500
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp455.000.000	Rp455.000.000	Rp455.000.000	Rp0	100,00%	Rp452.985.250	99,56%	Rp2.014.750
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp31.600.000	Rp31.600.000	Rp31.600.000	Rp0	100,00%	Rp31.517.500	99,74%	Rp82.500
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp28.000.000	Rp28.000.000	Rp28.000.000	Rp0	100,00%	Rp25.237.500	90,13%	Rp2.762.500
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp460.000.000	Rp460.000.000	Rp460.000.000	Rp0	100,00%	Rp451.595.120	98,17%	Rp8.404.880

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp458.720.000	Rp458.720.000	Rp458.720.000	Rp0	100,00%	Rp443.020.500	96,58%	Rp15.699.500
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp358.720.000	Rp358.720.000	Rp358.720.000	Rp0	100,00%	Rp353.570.000	98,56%	Rp5.150.000
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	100,00%	Rp89.450.500	89,45%	Rp10.549.500
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp3.059.404.724	Rp3.059.404.724	Rp3.059.404.724	Rp0	100,00%	Rp2.867.907.713	93,74%	Rp191.497.011
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp688.940.724	Rp688.940.724	Rp688.940.724	Rp0	100,00%	Rp627.174.113	91,03%	Rp61.766.611
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp0	100,00%	Rp119.340.000	99,45%	Rp660.000

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp2.250.464.000	Rp2.250.464.000	Rp2.250.464.000	Rp0	100,00%	Rp2.121.393.600	94,26%	Rp129.070.400
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp1.108.713.600	Rp1.108.713.600	Rp1.108.713.600	Rp0	95,20%	Rp1.008.970.550	91,00%	Rp99.743.050
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp148.242.840	Rp148.242.840	Rp148.242.840	Rp0	69,90%	Rp88.966.500	60,01%	Rp59.276.340
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp178.944.760	Rp178.944.760	Rp178.944.760	Rp0	98,31%	Rp149.100.900	83,32%	Rp29.843.860
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp277.390.000	Rp277.390.000	Rp277.390.000	Rp0	97,99%	Rp267.114.500	96,30%	Rp10.275.500
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Elvi Sundari, SE, MM	Rp504.136.000	Rp504.136.000	Rp504.136.000	Rp0	100,00%	Rp503.788.650	99,93%	Rp347.350

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp1.079.258.000	Rp905.520.000	Rp903.787.100	Rp1.732.900	83,39%	Rp866.642.408	80,30%	Rp212.615.592
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp225.234.000	Rp53.476.000	Rp52.568.500	Rp907.500	21,31%	Rp33.878.720	15,04%	Rp191.355.280
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Robi Aripurnawan, SE	Rp225.234.000	Rp53.476.000	Rp52.568.500	Rp907.500	21,31%	Rp33.878.720	15,04%	Rp191.355.280
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp854.024.000	Rp852.044.000	Rp851.218.600	Rp825.400	99,77%	Rp832.763.688	97,51%	Rp21.260.312
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Robi Aripurnawan, SE	Rp259.920.000	Rp259.920.000	Rp259.405.100	Rp514.900	100,00%	Rp255.823.122	98,42%	Rp4.096.878
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Robi Aripurnawan, SE	Rp594.104.000	Rp592.124.000	Rp591.813.500	Rp310.500	99,67%	Rp576.940.566	97,11%	Rp17.163.434

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp928.908.500	Rp928.908.500	Rp928.670.000	Rp238.500	99,45%	Rp893.962.827	96,24%	Rp34.945.673
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp928.908.500	Rp928.908.500	Rp928.670.000	Rp238.500	99,45%	Rp893.962.827	96,24%	Rp34.945.673
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Akhmad Prasetyo, S. Sos, MM	Rp712.251.500	Rp712.251.500	Rp712.023.000	Rp228.500	99,71%	Rp691.256.827	97,05%	Rp20.994.673
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Akhmad Prasetyo, S. Sos, MM	Rp216.657.000	Rp216.657.000	Rp216.647.000	Rp10.000	98,62%	Rp202.706.000	93,56%	Rp13.951.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp743.584.320	Rp684.615.000	Rp681.886.350	Rp2.728.650	88,39%	Rp609.635.361	81,99%	Rp133.948.959
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp743.584.320	Rp684.615.000	Rp681.886.350	Rp2.728.650	88,39%	Rp609.635.361	81,99%	Rp133.948.959

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
	Kabupaten/ Kota												
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp323.458.000	Rp323.458.000	Rp321.311.350	Rp2.146.650	98,79%	Rp304.247.539	94,06%	Rp19.210.461
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp194.501.320	Rp193.762.000	Rp193.685.000	Rp77.000	97,80%	Rp167.724.672	86,23%	Rp26.776.648
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp225.625.000	Rp167.395.000	Rp166.890.000	Rp505.000	65,37%	Rp137.663.150	61,01%	Rp87.961.850
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp700.019.000	Rp700.019.000	Rp692.825.500	Rp7.193.500	98,04%	Rp605.649.991	86,52%	Rp94.369.009
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp700.019.000	Rp700.019.000	Rp692.825.500	Rp7.193.500	98,04%	Rp605.649.991	86,52%	Rp94.369.009
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp164.439.000	Rp164.439.000	Rp164.340.500	Rp98.500	91,66%	Rp140.599.084	85,50%	Rp23.839.916

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD	Bagian/ Bidang/ Kelurahan/ UPT	PA/ KPA	PPTK	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi			Sisa Pagu
										Fisik	Keuangan		
										%	RP	%	
	Kegiatan Usahanya		Samarinda										
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp304.490.000	Rp304.490.000	Rp304.459.000	Rp31.000	100,00%	Rp300.141.252	98,57%	Rp4.348.748
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Chairuddin, S. Hut	Rp231.090.000	Rp231.090.000	Rp224.026.000	Rp7.064.000	100,00%	Rp164.909.655	71,36%	Rp66.180.345
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp508.446.000	Rp508.446.000	Rp506.939.900	Rp1.506.100	100,00%	Rp502.689.870	98,87%	Rp5.756.130
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				Rp508.446.000	Rp508.446.000	Rp506.939.900	Rp1.506.100	100,00%	Rp502.689.870	98,87%	Rp5.756.130
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	H. Julia Noor, SIP	Rosana, ST	Rp508.446.000	Rp508.446.000	Rp506.939.900	Rp1.506.100	100,00%	Rp502.689.870	98,87%	Rp5.756.130